

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PESERTA LELANG  
DI PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DALAM  
KAITANNYA DENGAN SURAT PERJANJIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FEBBY SAPUTRO  
011500023**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

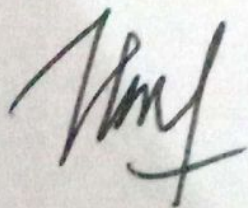
**Nama** : FEBBY SAPUTRO  
**NIM** : 011500023  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN PADA TAHAP PRAKONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN



**Palembang, 16 MARET 2019**

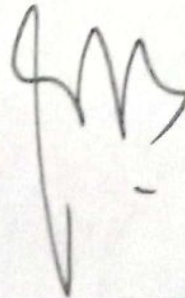
**Disetujui / Disahkan oleh :**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. HJ. JAUHARRIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,**



**Dr. H. HERMAN FIKRI, SH., SE., MM., M.Hum.**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PESERTA LELANG DI  
PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DALAM KAITANNYA DENGAN  
SURAT PERJANJIAN**

Penulis,  
**FEBBY SAPUTRO**

Pembimbing Pertama,  
**DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM., MH**  
Pembimbing Kedua,  
**DR. H. HERMAN FIKRI, SH., SE., MM., MH**

**ABSTRAK**

Lelang atau pengadaan yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai langkah meminimalisir tindak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan agar proses bisnis berjalan transparan sesuai dengan Tata Nilai perusahaan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode Impiris dan metode Normatif, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan serta mengumpulkan data secara mendalam, detail, dan juga actual.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan bahwa proses lelang berperan untuk mengatur secara rinci hak, kewajiban dan kesepakatan lainnya antara para pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan yang biasanya telah dituangkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) lelang dan hal – hal lain yang belum diatur pada RKS lelang. *Purchase Order (PO)* juga merupakan dokumen komitmen sederhana pembelian barang atau jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Pengadaan sesuai spesifikasi dan / atau ruang lingkup serta harga / biaya yang telah disepakati pada saat pelelangan.

**Kata Kunci : Sifat Hukum, Lelang, Surat Perjanjian**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	14
C. Ruang Lingkup .....	14
D. Metodologi .....	15
E. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II Tinjauan Pustaka .....	17
A. Pengertian Lelang .....	17
B. Pengertian Surat Perjanjian .....	22
C. Syarat-Syarat Terbentuknya Suatu Perjanjian .....	27
D. Jenis-Jenis Lelang .....	35

BAB III Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Peserta Lelang di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam Kaitannya dengan Surat Perjanjian .....	40
A. Peran Surat Perjanjian dalam Proses Lelang di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	40
B. Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Para Peserta Lelang .....	53
BAB IV Penutup .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-Saran .....	59
LAMPIRAN .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	86

## BAB IV Penutup

### A. Kesimpulan

1. Surat perjanjian dalam proses lelang berperan untuk mengatur secara rinci hak, kewajiban dan kesepakatan lainnya antara para pihak dalam melaksanakan suatu kegiatan yang biasanya telah dituangkan dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) lelang dan hal - hal lain yang belum diatur pada RKS lelang. *Purchase Order (PO)* juga merupakan dokumen komitmen sederhana pembelian barang atau jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Pengadaan sesuai spesifikasi dan / atau ruang lingkup serta harga / biaya yang telah disepakati pada saat pelelangan
2. Peserta lelang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan lelang secara bersih, tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak akan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun juga kepada Panitia Pengadaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Saat proses pelelangan, peserta lelang harus menyampaikan dokumen asli penawaran dan dokumen pendukung, menyerahkan Jaminan Penawaran Pelelangan yang berupa Uang Tunai atau Bank Garansi, mengikuti proses auction dengan 3 sesi penurunan harga dimana peserta lelang memberikan harga penawaran pada Sesi I lebih rendah dari harga yang tercantum dalam surat penawaran ke

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan begitu juga penawaran sesi II harus lebih rendah dari sesi I dan seterusnya, kemudian setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang harus bersedia diikat dengan surat perjanjian dan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Apabila tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dan tidak dipenuhi oleh peserta lelang maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jaminan penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang serta tidak boleh mengikuti pelelangan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang atau masuk daftar hitam (*black list*) selama 2 (dua) tahun

## B. Saran - Saran

1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebaiknya menyampaikan dengan jelas terkait sanksi pidana maupun sanksi perdata sesuai dengan KUH Pidana dan KUH Perdata terkait lelang dan perjanjian apabila dikemudian hari terjadi kecurangan pada saat lelang maupun wanprestasi agar peserta lelang maupun pemenang lelang tereduksi sejak awal serta mengecilkan peluang terjadinya kecurangan pada saat lelang dan meminimasi terjadinya wanprestasi.
2. Peserta lelang agar melaksanakan proses lelang dengan jujur dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sehingga tercipta lelang yang bersih, profesional dan penuh tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatursa

Asmah. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. UII Press : Yogyakarta

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2017. *Laporan Tahunan 2017* PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2017. *Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang tentang Wewenang Pejabat untuk Menyetujui dan Menandatangani Komitmen Pengadaan Barang & Pengadaan Jasa serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang 2018. *Order Kerja Jasa Custom Clearance*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2018. *Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Barang PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2018. *Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Jasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Palembang

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2018. *Surat Perjanjian Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pemuatan Pupuk Ekspor dalam Kantong Via Container di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang: Palembang

Salim, HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta

Sdb, Ali Burhanudin & Poernama S. 2016. *5 Menit Langsung Jadi Membuat Perjanjian ( Surat Kontrak )*. Anugrah : Jakarta

Simamora, Y Sogar. 2017. *Hukum Kontrak*. Laksbang Pressindo : Jawa Timur



Soemara, R. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. PT Eresco Bandung  
 Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta

Sutardi, Utama, AP. 2018. *Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Jasa Pengurusan Transportasi untuk Pemuatan Pupuk Ekspor dalam Kantong Via Container di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Palembang

Wahib, A. *Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Beserta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah*, BP Cipta Karya. Jakarta

Widyawati. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. SL Media. Jakarta

## B. Peraturan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) & KUHPA ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

## C. Internet

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2017. *E-Integrity Pact PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*. Di <http://paktaintegritas.pusri.co.id/new/index.php>  
 (Diakses tanggal 22 Februari 2019)

Sadono, Y. 2008. *Fungsi Bank Garansi Sebagai Jaminan Pelaksana Tender*. Di <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20081105024421>  
 (Diakses tanggal 22 Februari 2019)